

Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis
VOL 4, No. 3, Oktober 2025, pp. 99 - 109
p-ISSN: 2809-1655 (media cetak)
e-ISSN: 2809-1981 (media online)
Link Publikasi: https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JIMEB/issue/view/168
DOI: https://doi.org/10.51903/c3vb6g41

The Influence of Internal Accountability and Financial Transparency on the Efficiency of Regional Government Expenditure

Yohanes Chalisto*[1], Grisologus Julianto[2]
[1]Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126, Indonesia
Email: joha.yohanes@gmail.com*[1]

ARTICLE INFO

Article history:

Received : Aug 2025
Revised : Sept 2025
Accepted : Oct 2025
Published : Oct 2025

ABSTRACT

Efficiency in public expenditure remains a major challenge in Indonesia's regional financial management, particularly amid fiscal constraints and growing demands for transparency. This study is purposed to examine the influence of internal accountability and financial transparency on the efficiency of regional government expenditure. This research uses secondary data from the Regional Government Financial Reports (LKPD) published by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Bureau of Statistics (BPS), with panel data comprising 34 provinces in Indonesia for the period 2019–2023, and employs a fixed-effects model. The results show that internal accountability and financial transparency both have a positive, significant effect on regional expenditure efficiency. A one-point increase in internal accountability raises efficiency by 0.42 points, while a one-point increase in financial transparency raises it by 0.35 points. These findings imply that a combination of strong internal controls and public financial disclosure fosters fiscal discipline and reduces budget inefficiency. In theoretical terms, this study extends the application of agency theory and new public management in developing economies by highlighting the critical role of the synergy between accountability and transparency in determining sustainable fiscal efficiency in local governance.

Keywords: *Internal Accountability, Financial Transparency, Fiscal Efficiency, Public Governance, Fiscal Decentralization.*

This journal is an open-access publication. All articles are freely and permanently accessible to everyone. Copyright © 2025 by the Author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

ABSTRAK

Efisiensi pengeluaran publik merupakan tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) pada data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Laporan Keuangan

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh DJPK Kementerian Keuangan dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik akuntabilitas internal maupun transparansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengeluaran daerah. Setiap peningkatan satu poin dalam akuntabilitas internal meningkatkan efisiensi sebesar 0,42 poin, sedangkan transparansi keuangan sebesar 0,35 poin. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi mekanisme pengawasan internal dan keterbukaan informasi publik memperkuat disiplin fiskal dan mengurangi potensi pemborosan anggaran. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan agency theory dan new public management dalam konteks negara berkembang, dengan menegaskan bahwa sinergi antara akuntabilitas dan transparansi merupakan determinan utama efisiensi fiskal daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Internal, Transparansi Keuangan, Efisiensi Fiskal, Tata Kelola Publik, Desentralisasi Fiskal.

1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Jamaludin et al., 2025; Wardi & Aninditiyah, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatnya beban fiskal akibat keterbatasan penerimaan daerah, tingginya belanja rutin, dan rendahnya efisiensi penggunaan anggaran publik. Ketidakseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pelayanan publik sering kali menyebabkan alokasi anggaran tidak optimal, sehingga efektivitas kebijakan pembangunan daerah menjadi kurang maksimal. Kondisi ini menuntut adanya reformasi tata kelola keuangan yang menekankan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan sumber daya publik secara akuntabel. Dalam konteks tersebut, faktor akuntabilitas internal dan transparansi keuangan menjadi dua elemen kunci yang diyakini mampu memperbaiki efisiensi pengeluaran pemerintah daerah secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara empiris bagaimana kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap efisiensi fiskal daerah dalam kerangka tata kelola keuangan publik yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia masih jauh dari ideal. Penelitian oleh (Rosario et al., 2025) yang telah menilai anggaran daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dengan menggunakan model *Data Envelopment Analysis* (DEA) menemukan bahwa hanya 7 dari 35 daerah (sekitar 20 %) yang mencapai efisiensi dalam proses realisasi anggaran. Selain itu, penelitian lainnya menunjukkan adanya "*budget stress*" (ketegangan anggaran) di pemerintah daerah yang berdampak pada rendahnya pelaksanaan belanja daerah secara optimal (Barrett & Safransky, 2024) dan (Wenjuan & Zhao, 2023). Sementara itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih memperlihatkan perbedaan kinerja di antara berbagai wilayah, yang di analisis oleh (Janský et al., 2023) dan (Ferreira et al., 2022) yang mengkaji pengelolaan keuangan daerah melalui situs web mengindikasikan bahwa indeks transparansi secara rata-rata menunjukkan variabilitas yang cukup signifikan antar daerah. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun alokasi belanja semakin besar, belum tentu disertai dengan peningkatan efisiensi dan kinerja yang optimal.

Beberapa penelitian empiris telah mengkaji hubungan antara akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian oleh (Desdiani et al., 2022) dan (Salomo & Rahmayanti, 2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas sebagai aspek tata kelola berpengaruh terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian oleh (Guerrero-Gómez et al., 2021) juga menyoroti bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah (melalui publikasi laporan, website, dan sistem informasi daerah) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Lebih lanjut, studi tentang kontrol internal dan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa kapasitas kontrol internal dan sistem pelaporan yang andal dapat mendukung kualitas keuangan daerah (Hamed, 2023) dan (Mutoharoh & Ifada, 2023). Dengan demikian, literatur telah menunjukkan bahwa faktor tata kelola keuangan (akuntabilitas internal, transparansi, kontrol internal) tampaknya penting dalam rangka meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.

Meskipun sejumlah penelitian telah menghubungkan akuntabilitas dan transparansi dengan efisiensi pengeluaran daerah, terdapat beberapa kekosongan riset yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian belum secara simultan menguji pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan secara bersama-sama terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah, sehingga kontribusi relatif masing-masing belum diklarifikasi (Haustein & C. Lorson, 2023; Urdaneta et al., 2021) dan (Indudewi et al., 2023). Kedua, banyak

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

penelitian terdahulu menggunakan ukuran efisiensi yang terbatas pada sektor tertentu, seperti pendidikan atau kesehatan, sehingga hasilnya tidak menggambarkan efisiensi fiskal secara menyeluruh pada pemerintah daerah (Mbau et al., 2022; Muhtar et al., 2021) dan (Milán-García et al., 2022). Ketiga, konteks otonomi daerah di Indonesia menghadirkan kompleksitas baru dalam tata kelola keuangan, tetapi penelitian tentang integrasi antara sistem akuntabilitas internal dan transparansi keuangan masih sangat terbatas dan belum banyak dilakukan di tingkat kabupaten/kota (Afonso et al., 2024; Miranda-Lescano et al., 2023) dan (Madubun, 2024). Selain itu, literatur yang ada cenderung berfokus pada aspek kepatuhan administratif, bukan pada efektivitas sistem akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan efisiensi belanja publik (Mendez & Bachtler, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara empiris hubungan simultan antara akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Secara spesifik, penelitian ingin mengetahui seberapa besar peran akuntabilitas internal dan transparansi keuangan dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah serta interaksi antara kedua variabel tersebut dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Kontribusi penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoretis dengan memperkaya literatur terkait pengelolaan keuangan publik daerah serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas internal dan transparansi sebagai strategi peningkatan efisiensi. Dengan demikian, akan muncul satu pertanyaan penelitian utama berikut: *Bagaimana pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah?*

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas Internal sebagai Pilar Efisiensi Belanja Daerah

Akuntabilitas internal menjadi elemen utama dalam membangun sistem pengelolaan keuangan publik yang efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas internal tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan pembangunan. Studi oleh (Dewi et al., 2022) dan (Arjun & Dyah, 2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas berbasis Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Sementara itu, (Boufounou et al., 2024) menegaskan bahwa struktur akuntabilitas internal yang kuat mampu mengurangi praktik pemborosan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, akuntabilitas internal dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol internal yang memengaruhi efisiensi fiskal melalui peningkatan disiplin dan tanggung jawab organisasi.

Teori Agency Theory yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjadi landasan penting dalam menjelaskan hubungan antara akuntabilitas internal dan efisiensi belanja publik (Dabboussi, 2024; Onana, 2024) dan (Abdulaziz & Al-Faryan, 2024). Teori ini berasumsi bahwa terdapat hubungan kontraktual antara principal (masyarakat) dan agent (pemerintah), di mana pengawasan dan pelaporan diperlukan untuk menekan perilaku oportunistik agen. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas internal bertindak sebagai instrumen yang mengurangi *information asymmetry* antara pelaksana anggaran dan publik. Penelitian oleh (Alqudah et al., 2023) menemukan bahwa penguatan audit internal dan pelaporan berkala secara signifikan meningkatkan efisiensi anggaran karena setiap aktivitas belanja diuji manfaatnya terhadap tujuan publik. Selain itu, (Antoaneta Vărzaru, 2022) dan (Qatawneh, 2023) mengonfirmasi bahwa budaya akuntabilitas internal yang tinggi mendorong efisiensi keuangan daerah melalui peningkatan efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja.

2.2. Transparansi Keuangan dan Kaitannya dengan Efisiensi Fiskal Daerah

Transparansi keuangan publik merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien. Transparansi mendorong terbentuknya sistem pengawasan sosial melalui akses publik terhadap informasi fiskal yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Penelitian oleh (Mustanir et al., 2024) dan (F. Christinawati, 2023) menunjukkan bahwa penerapan portal transparansi anggaran berbasis digital meningkatkan efektivitas pengawasan publik dan efisiensi belanja daerah secara signifikan. Selaras dengan temuan (Su et al., 2023) dan (Fazekas & Czibik, 2021) yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki rasio efisiensi pengeluaran yang lebih baik karena partisipasi publik menekan potensi penyimpangan. Fakta ini menegaskan

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis dalam memperkuat efisiensi fiskal.

Menurut (Musiega et al., 2023), transparansi *Public Financial Management* (PFM) merupakan komponen inti dari tata kelola fiskal yang sehat karena memastikan setiap tahap siklus anggaran dapat diawasi dan diverifikasi publik. Konteks ini menekankan bahwa keterbukaan informasi keuangan akan memperkuat akuntabilitas dan mengurangi ketidakefisienan alokasi sumber daya publik. Studi oleh (Mungiu-Pippidi, 2023) juga mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa transparansi digital mampu menurunkan biaya pengawasan dan meningkatkan ketepatan penggunaan dana publik. Selain itu, (Li & Shen, 2021; Paula Monteiro et al., 2022) dan (Abdelrahim & Al-Malkawi, 2022) menambahkan bahwa integrasi transparansi fiskal dengan sistem audit internal dapat meningkatkan efisiensi dibandingkan model tradisional. Dengan demikian, transparansi keuangan berfungsi sebagai pendorong efisiensi fiskal yang memperkuat mekanisme kontrol internal di pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari berbagai temuan empiris tersebut, bagian berikut menyajikan sintesis teoretis yang merumuskan hubungan konseptual antara akuntabilitas internal, transparansi keuangan, dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah sebagai dasar pengembangan hipotesis penelitian ini.

2.3. Sintesis Teoretis dan Implikasi Empiris

Keterkaitan antara akuntabilitas internal, transparansi keuangan, dan efisiensi pengeluaran daerah dapat dijelaskan melalui *New Public Management* (NPM) theory. Temuan oleh Osborne dan Gaebler (1993) dalam kerangka NPM menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajerial sektor swasta seperti efisiensi, efektivitas, dan pengukuran kinerja dalam sektor publik (Virtanen & Jalonen, 2023) dan (McMullin, 2023). Berdasarkan teori ini, pemerintah yang menegakkan akuntabilitas internal dan transparansi keuangan akan mampu meningkatkan efisiensi anggaran karena proses pengambilan keputusan lebih terukur dan berbasis kinerja. Penelitian oleh (Saputra & Setiawan, 2021) dan (Gherardi et al., 2021) mendukung kerangka ini dengan menunjukkan bahwa integrasi akuntabilitas dan transparansi memperkuat efisiensi fiskal daerah. Selain itu, (Onofrei et al., 2022) dan (Dracea et al., 2024) juga menemukan bahwa sinergi dua variabel ini berperan penting dalam menciptakan kinerja fiskal daerah yang lebih optimal.

Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan empiris dalam menguji hubungan simultan antara kedua variabel tersebut terhadap efisiensi pengeluaran daerah. Sebagian besar studi hanya menyoroti salah satu aspek, baik akuntabilitas maupun transparansi, tanpa mempertimbangkan efek interaksi keduanya secara komprehensif. Studi oleh (Handoyo et al., 2023) dan (Opferkuch et al., 2021) menggarisbawahi bahwa ketidakkonsistenan hasil penelitian sering kali disebabkan oleh perbedaan metodologi dan ukuran efisiensi fiskal yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menutup kesenjangan tersebut dengan menguji secara empiris bagaimana interaksi antara akuntabilitas internal dan transparansi keuangan dapat memengaruhi efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan tinjauan literatur dan teori tersebut, penelitian ini menempatkan akuntabilitas internal dan transparansi keuangan sebagai dua determinan utama yang secara simultan memengaruhi efisiensi pengeluaran pemerintah daerah, sehingga layak diuji secara empiris pada konteks desentralisasi fiskal di Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian dan Pendekatan Analisis

Penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia. Model ini dipilih karena mampu menangkap perbedaan karakteristik antarwilayah yang bersifat tetap sepanjang waktu, sehingga hasil estimasi menjadi lebih akurat. Fokus utama penelitian adalah menilai pengaruh simultan dari dua variabel independen terhadap efisiensi pengeluaran daerah dengan memperhatikan variasi waktu dan karakteristik antarwilayah. Desain ini juga memungkinkan identifikasi kekuatan pengaruh relatif dari masing-masing variabel terhadap efisiensi fiskal daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman empiris yang komprehensif mengenai peran tata kelola internal dalam meningkatkan efektivitas belanja publik di tingkat pemerintah daerah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

Penelitian ini menggunakan data panel tahunan periode 2019–2023 yang mencakup 34 pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Pemilihan periode ini didasarkan pada dua alasan utama, yaitu masa tersebut merepresentasikan fase transisi penting dalam reformasi sistem pelaporan keuangan digital melalui *Online Monitoring* SPAN (OM-SPAN) dan *e-budgeting*, serta meliputi periode pandemi COVID-19 yang menimbulkan tekanan terhadap efisiensi fiskal daerah. Data penelitian diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, serta dilengkapi dengan data makroekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh data dikompilasi dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi antarperiode sebelum dilakukan proses pengolahan statistik.

Penelitian ini secara spesifik menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah provinsi, laporan kinerja instansi pemerintah, dan publikasi resmi BPS. Data sekunder dipilih karena telah melalui proses verifikasi institusional dan dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah secara faktual. Periode observasi lima tahun memberikan gambaran tren dan perubahan dalam pengelolaan fiskal daerah selama masa reformasi keuangan publik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi di Indonesia, dengan total 34 provinsi yang dianalisis secara lengkap selama periode 2019–2023. Seluruh data yang terkumpul kemudian disusun dalam format panel agar variasi antarwaktu dan antarwilayah dapat dianalisis secara simultan dan terukur.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan tiga variabel utama, yaitu akuntabilitas internal, transparansi keuangan, dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Akuntabilitas internal diukur berdasarkan indikator sistem pengawasan internal, kepatuhan terhadap prosedur, serta mekanisme evaluasi kinerja yang diterapkan oleh masing-masing daerah. Transparansi keuangan direpresentasikan melalui keterbukaan informasi publik mengenai laporan keuangan, kemudahan akses terhadap data anggaran, dan kejelasan penggunaan dana publik. Efisiensi pengeluaran pemerintah daerah diukur menggunakan rasio antara realisasi belanja dengan capaian kinerja yang dihasilkan dalam satu periode anggaran. Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk indeks atau rasio agar dapat diolah secara kuantitatif dan dibandingkan antarperiode maupun antardaerah.

Setelah seluruh variabel terdefinisi secara operasional, langkah selanjutnya adalah memastikan keandalan hasil estimasi model yang digunakan. Sebagai langkah penguatan validitas empiris, penelitian ini juga melakukan uji robustnes sederhana dengan membandingkan hasil FEM terhadap model alternatif menggunakan pendekatan *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). Uji pembanding ini bertujuan untuk memastikan konsistensi arah dan signifikansi koefisien antarvariabel utama pada dua metode analisis yang berbeda. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa estimasi FEM tetap stabil dan robust terhadap perubahan spesifikasi model, sehingga meningkatkan keandalan kesimpulan empiris. Dengan demikian, hubungan positif antara akuntabilitas internal, transparansi keuangan, dan efisiensi fiskal dapat dipastikan bukan artefak metode, melainkan refleksi nyata dari kondisi tata kelola keuangan daerah di Indonesia.

3.4. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh hasil estimasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan FEM dan *Random Effect Model* (REM) untuk menguji pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Model efek tetap digunakan untuk menangkap karakteristik khusus masing-masing daerah yang bersifat konstan selama periode penelitian, sedangkan model efek acak digunakan bila variasi individu dianggap bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Hausman, yang digunakan untuk menentukan pendekatan paling sesuai dengan karakteristik data panel. Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik *Stata 17,* sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat objektif dan dapat diandalkan. Hasil akhir dari model ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai hubungan antara tata kelola internal dan efisiensi fiskal daerah.

3.5. Uji Asumsi dan Validitas Model

Sebelum dilakukan estimasi model utama, penelitian ini melaksanakan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan keandalan dan validitas hasil. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa adanya korelasi antarvariabel independen, sedangkan uji autokorelasi dan heteroskedastisitas diterapkan guna memastikan stabilitas varians residual. Uji normalitas residual juga dilakukan agar distribusi data sesuai dengan asumsi

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

model ekonometrika yang digunakan. Selain itu, dilakukan uji signifikansi simultan dan parsial (F-test dan t-test) untuk menilai kekuatan pengaruh antarvariabel secara keseluruhan maupun individu. Dengan langkah-langkah ini, hasil analisis yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat ketepatan tinggi dan dapat dijadikan dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan peningkatan efisiensi pengeluaran publik di tingkat pemerintah daerah.

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1. Hasil

4.1.1. Uji Model dan Kelayakan Data

Analisis dilakukan terhadap 34 pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023 menggunakan pendekatan data panel. Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,031 (< 0,05) yang mengindikasikan bahwa model FEM merupakan model yang paling sesuai. Seluruh uji asumsi klasik menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria, yaitu tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi, maupun heteroskedastisitas. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan layak untuk mengestimasi hubungan antarvariabel penelitian. Dengan kelayakan model tersebut, analisis selanjutnya dapat dilakukan untuk menguji pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.

4.1.2. Hasil Analisis Model Fixed Effect Model (FEM)

Hasil estimasi FEM pada Tabel 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas internal dan transparansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Setiap peningkatan satu poin dalam indeks akuntabilitas internal meningkatkan efisiensi sebesar 0,42 poin, sementara peningkatan satu poin transparansi keuangan meningkatkan efisiensi sebesar 0,35 poin. Model ini memiliki daya jelaskan (R^2) sebesar 0,78. Nilai F-statistik sebesar 54,21 ($p < 0,01$) mengindikasikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan. Hasil uji robustness menggunakan *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) juga menunjukkan konsistensi arah dan signifikansi, yang memperkuat validitas empiris temuan ini.

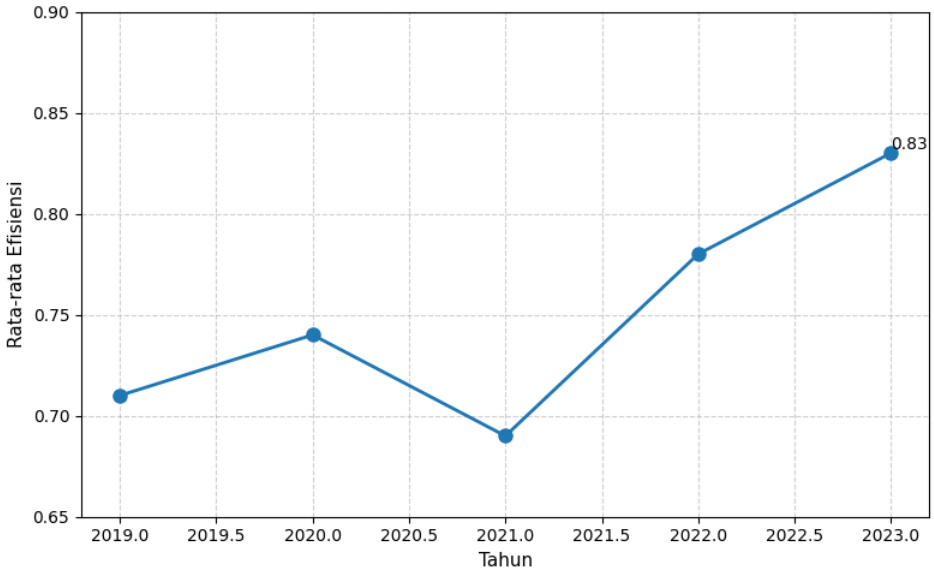
Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel Independen	Koefisien	t-Statistik	Signifikansi
Akuntabilitas Internal	0.42	6.27	0.000
Transparansi Keuangan	0.35	5.91	0.000
Konstanta	0.18	2.74	0.007
R^2	0.78		
F-Statistik	54.21		0.000

4.1.3. Analisis Tren Efisiensi Belanja Daerah

Hasil analisis tren efisiensi pengeluaran yang ditunjukkan pada Gambar 1 menunjukkan peningkatan rata-rata dari 0,71 pada tahun 2019 menjadi 0,83 pada tahun 2023. Penurunan sementara pada tahun 2021 (0,68) berkaitan erat dengan tekanan fiskal akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan realokasi anggaran mendesak dan gangguan operasional. Pemulihan signifikan pada tahun 2022–2023 sejalan dengan implementasi sistem pelaporan keuangan digital (*e-budgeting* dan *e-reporting*) yang diperkuat di sebagian besar pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa adaptasi teknologi dalam tata kelola keuangan publik berperan penting dalam menjaga ketahanan fiskal pascakrisis.

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531



Gambar 1. Tren Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah (2019–2023)

4.2. Diskusi

Temuan empiris penelitian ini memperkuat proposisi teoretis bahwa akuntabilitas internal dan transparansi keuangan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal Indonesia, sinergi antara kedua dimensi tata kelola ini bekerja melalui dua mekanisme yang saling memperkuat. Pertama, akuntabilitas internal berfungsi sebagai *control mechanism* yang meningkatkan disiplin anggaran melalui audit dan evaluasi kinerja di dalam birokrasi. Kedua, transparansi keuangan berperan sebagai *social accountability mechanism* yang membangun tekanan publik konstruktif melalui akses informasi, sehingga mendorong perilaku aparatur yang lebih efisien. Sinergi ini selaras dengan kerangka *Agency Theory* dan *New Public Management*, yang menekankan pentingnya pengurangan asimetri informasi dan penerapan prinsip manajerial berbasis kinerja di sektor publik.

Secara empiris, hasil ini sejalan dengan temuan (Mustanir et al., 2024) dan (Mungiu-Pippidi, 2023) yang menyoroti peran sistem digital dan audit internal dalam efektivitas anggaran daerah. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa sinergi antara akuntabilitas internal dan transparansi keuangan menghasilkan pengaruh ganda terhadap efisiensi fiskal. Interaksi kedua variabel ini memperkuat kontrol kelembagaan (*monitoring*) sekaligus membangun legitimasi sosial (*trust building*). Sinergi tersebut menciptakan lingkungan tata kelola yang lebih adaptif dan resisten terhadap inefisiensi.

Implikasi kebijakan dari temuan ini relevan dengan agenda reformasi fiskal nasional. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk memperkuat fungsi audit internal serta memperluas penerapan *e-budgeting* dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital. Di tingkat pusat, pengembangan skema insentif bagi daerah dengan kinerja transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dapat menjadi salah satu opsi kebijakan. Temuan ini juga memberikan dukungan empiris terhadap semangat regulasi seperti Perpres No. 33 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas internal dan transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Setiap peningkatan satu poin pada kedua variabel tersebut secara signifikan meningkatkan efisiensi belanja daerah. Secara teoretis, temuan ini memperluas penerapan *Agency Theory* dan *New Public Management* dalam konteks negara berkembang. Penelitian ini menyoroti sinergi antara mekanisme pengawasan internal dan pembangunan kepercayaan publik sebagai pendorong efisiensi fiskal.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini mendukung penguatan sistem audit internal di pemerintah daerah. Optimalisasi platform digital untuk transparansi anggaran juga dapat dipertimbangkan sebagai strategi

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

penting. Bagi penelitian selanjutnya, perluasan model dengan variabel kontekstual seperti partisipasi publik direkomendasikan. Pendekatan analisis efisiensi yang beragam juga diperlukan untuk memperkaya pemahaman determinan kinerja fiskal daerah.

REFERENSI

Abdelrahim, A., & Al-Malkawi, H. A. N. (2022). The Influential Factors of Internal Audit Effectiveness: A Conceptual Model. *International Journal of Financial Studies*, *10*(3), 71. https://doi.org/10.3390/ijfs10030071

Abdulaziz, M., & Al-Faryan, S. (2024). Agency Theory, Corporate Governance and Corruption: An Integrative Literature Review Approach. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2337893. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893

Afonso, A., Tovar Jalles, J., & Venâncio, A. (2024). Fiscal Decentralization and Public Sector Efficiency: Do Natural Disasters Matter? *Economic Modelling*, *137*, 106763. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106763

Alqudah, H., Amran, N. A., Hassan, H., Lutfi, A., Alessa, N., Alrawad, M., & Almaiah, M. A. (2023). Examining the Critical Factors of Internal Audit Effectiveness from Internal Auditors' Perspective: Moderating Role of Extrinsic Rewards. *Heliyon*, *9*(10), e20497. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20497

Antoaneta Vărzaru, A. (2022). An Empirical Framework for Assessment of the Effects of Digital Technologies on Sustainability Accounting and Reporting in the European Union. *Electronics*, *11*(22), 3812. https://doi.org/10.3390/electronics11223812

Arjun, R., & Dyah, P. (2024). Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *17*(2), 82–88. https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.1907

Barrett, E., & Safransky, S. (2024). Reimagining the Municipal Economy: The Emancipatory Politics of the People's Budget Movement. *Urban Studies*, *61*(11), 2135–2155. https://doi.org/10.1177/00420980241231439

Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Poulopoulos, J. (2024). Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations: A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development. *Economies*, *12*(4), 78. https://doi.org/10.3390/economies12040078

Dabboussi, M. (2024). Does Debt Structure Explain the Relationship between Agency Cost of Free Cash Flow and Dividend Payment? Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(6), 223. https://doi.org/10.3390/jrfm17060223

Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiah, A. (2022). Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia. *Economies*, *10*(5), 108. https://doi.org/10.3390/economies10050108

Dewi, A. ; A. ;, Hasibuan, H. T. ;, Paramadani, R. B., Visvizi, A., Alhalabi, W., Assem, S., Razek, A., Gerli, P., Troisi, O., Ariyanto, D., Dewi, A. A., Hasibuan, H. T., & Paramadani, R. B. (2022). The Success of Information Systems and Sustainable Information Society: Measuring the Implementation of a Village Financial System. *Sustainability*, *14*(7), 3851. https://doi.org/10.3390/su14073851

Dracea, R. M., Pirtea, M. G., Cristea, M., Noja, G. G., & Ciobanu, L. (2024). Budget Transparency and Good Governance for Human Development and Citizens' Well-Being. New Empirical Evidence from the European Union. *Engineering Economics* , *35*(3), 328–347. https://doi.org/10.5755/j01.ee.35.3.34024

F. Christinawati, P. (2023). Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *16*(1), 193–198. https://doi.org/10.51903/kompak.v16i1.1125

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

Fazekas, M., & Czibik, Á. (2021). Measuring Regional Quality of Government: The Public Spending Quality Index Based on Government Contracting Data. *Regional Studies*, *55*(8), 1459–1472. https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1902975

Ferreira, A., Bandeira, A. M., Santos, C., Ferreira, I., Tomé, B., Costa, A. J., Joaquim, C., Góis, C., Curi, D., Meira, D., Azevedo, G., Inácio, H., Jesus, M., Teixeira, M. G., Monteiro, P., Duarte, R., & Marques, R. P. (2022). Can Online Transparency Improve Accountability? The Case of Portuguese Private Social Solidarity Institutions. *Sustainability*, *14*(3), 1632. https://doi.org/10.3390/su14031632

Gherardi, L., Linsalata, A. M., Gagliardo, E. D., & Orelli, R. L. (2021). Accountability and Reporting for Sustainability and Public Value: Challenges in the Public Sector. *Sustainability*, *13*(3), 1097. https://doi.org/10.3390/su13031097

Guerrero-Gómez, T., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D. (2021). Promoting Online Transparency to Help Achieve the Sustainable Development Goals: An Empirical Study of Local Governments in Latin America. *Sustainability*, *13*(4), 1837. https://doi.org/10.3390/su13041837

Hamed, R. (2023). The Role of Internal Control Systems in Ensuring Financial Performance Sustainability. *Sustainability*, *15*(13), 10206. https://doi.org/10.3390/su151310206

Handoyo, S., Suharman, H., Ghani, E. K., & Soedarsono, S. (2023). A Business Strategy, Operational Efficiency, Ownership Structure, and Manufacturing Performance: The Moderating Role of Market Uncertainty and Competition Intensity and Its Implication on Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *9*(2), 100039. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100039

Haustein, E., & C. Lorson, P. (2023). Transparency of Local Government Financial Statements: Analyzing Citizens' Perceptions. *Financial Accountability and Management*, *39*(2), 375–393. https://doi.org/10.1111/faam.12353

Indudewi, D., Nafasati, F., Sudarmanto, B., & Putranto, A. D. (2023). Akuntabilitas Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *7*(2), 945–954. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1370

Jamaludin, H., Hartono, B., & Kuncoro, A. A. (2025). Optimization of Inclusive Education through the Implementation of Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges. *Journal of Technology Informatics and Engineering*, *4*(2), 277–288. https://doi.org/10.51903/jtie.v4i2.219

Janský, P., Palanský, M., & Wójcik, D. (2023). Shallow and Uneven Progress towards Global Financial Transparency: Evidence from the Financial Secrecy Index. *Geoforum*, *141*, 103728. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103728

Li, D., & Shen, W. (2021). Can Corporate Digitalization Promote Green Innovation? The Moderating Roles of Internal Control and Institutional Ownership. *Sustainability*, *13*(24), 13983. https://doi.org/10.3390/su132413983

Madubun, J. (2024). Public Services in Island Sub-Districts: Towards Geography-Based Governance. *Australian Journal of Public Administration*, *83*(3), 308–327. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12586

Mbau, R., Musiega, A., Nyawira, L., Tsofa, B., Mulwa, A., Molyneux, S., Maina, I., Jemutai, J., Normand, C., Hanson, K., & Barasa, E. (2022). Analysing the Efficiency of Health Systems: A Systematic Review of the Literature. *Applied Health Economics and Health Policy*, *21*, 205–224. https://doi.org/10.1007/s40258-022-00785-2

McMullin, C. (2023). The Persistent Constraints of New Public Management on Sustainable Co-Production between Non-Profit Professionals and Service Users. *Administrative Sciences*, *13*(2), 37. https://doi.org/10.3390/admsci13020037

Mendez, C., & Bachtler, J. (2024). The Quality of Government and Administrative Performance: Explaining Cohesion Policy compliance, Absorption and Achievements Across EU Regions. *Regional Studies*, *58*(4), 690–703. https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2083593

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

Milán-García, J., Rueda-López, N., & De Pablo-Valenciano, J. (2022). Local Government Efficiency: Reviewing Determinants and Setting New Trends. *International Transactions in Operational Research*, *29*(5), 2871–2898. https://doi.org/10.1111/itor.13032

Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2023). Human Development and Decentralization: The Importance of Public Health Expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, *94*(1), 191–219. https://doi.org/10.1111/apce.12373

Muhtar, Arifin, T., & Sutaryo. (2021). Performance Accountability in Indonesian Local Governments: Does Monitoring Really Work? *International Journal of Business and Society*, *22*(3), 1673–1692. https://doi.org/10.33736/ijbs.4329.2021

Mungiu-Pippidi, A. (2023). Transparency and Corruption: Measuring Real Transparency by a New Index. *Regulation and Governance*, *17*(4), 1094–1113. https://doi.org/10.1111/rego.12502

Musiega, A., Nyawira, L., Tsofa, B., Njuguna, R. G., Munywoki, J., Hanson, K., Mulwa, A., Molyneux, S., Maina, I., Normand, C., Jemutai, J., & Barasa, E. (2023). Budget Monitoring, Accountability Practices and Their Influence on the Efficiency of County Health Systems in Kenya. *Plos Global Public Health*, *3*(11), e0001908. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001908

Mustanir, A., Nurul, Nisa, A., Rais, Muhammad, Razak, R., Sellang, Kamaruddin, & Jermsittiparsert, Kittisak. (2024). Is It Possible for Village Government Public Services To Be Qualified Using Digital-Based Applications? *Jurnal Studi Pemerintahan*, *15*(3), 249–281. https://doi.org/10.18196/jsp.v15i3.381

Mutoharoh, M., & Ifada, L. M. (2023). Improving the Quality of Local Government Financial Reporting through the Impact of Internal Control System with Human Resource Competencies as a Moderator. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *13*(2), 301–3015. https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.25375

Onana, S. P. (2024). Do Programme Budget Mechanisms Improve the Efficiency of Public Spending? Elements of Theory and Empirical Data from Cameroon. *International Review of Administrative Sciences*, *90*(1), 185–202. https://doi.org/10.1177/00208523231201256

Onofrei, M., Oprea, F., Iaţu, C., Cojocariu, L., & Anton, S. G. (2022). Fiscal Decentralization, Good Governance and Regional Development—Empirical Evidence in the European Context. *Sustainability*, *14*(12), 7093. https://doi.org/10.3390/su14127093

Opferkuch, K., Caeiro, S., Salomone, R., & Ramos, T. B. (2021). Circular Economy in Corporate Sustainability Reporting: A Review of Organisational Approaches. *Business Strategy and the Environment*, *30*(8), 4015–4036. https://doi.org/10.1002/bse.2854

Paula Monteiro, A., Vale, J., Leite, E., Lis, M., & Kurowska-Pysz, J. (2022). The Impact of Information Systems and Non-Financial Information on Company Success. *International Journal of Accounting Information Systems*, *45*, 100557. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2022.100557

Qatawneh, A. M. (2023). The Role of Organizational Culture in Supporting Better Accounting Information Systems Outcomes. *Cogent Economics & Finance*, *11*(1), 2164669. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2164669

Rosario, M., Aji, W., & Letizia, E. (2025). Assesing the Efficiency of Central Java's Regional Budget Realization Using Data Envelopment Analysis. *Equity: Jurnal Ekonomi*, *13*(1), 113–122. https://doi.org/10.33019/equity.v13i1.434

Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and Institutional Challenges on Local Governments Performance Accountability System Reform in Indonesia. *Sage Open*, *13*(4), 1–14. https://doi.org/10.1177/21582440231196659

Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal Decentralization, Accountability and Corruption Indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *13*(1), 29–40. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

Su, H., Lu, Y., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023). Good Governance within Public Participation and National Audit for Reducing Corruption. *Sustainability*, *15*(9), 7030. https://doi.org/10.3390/su15097030

Urdaneta, R., Guevara-Pérez, J. C., Llena-Macarulla, F., Moneva, J. M., Calabuig-Moreno, F., Alonso, M., Santos, D., García-Fernández, J., & Núñez-Pomar, J. M. (2021). Transparency and Accountability in Sports: Measuring the Social and Financial Performance of Spanish Professional Football. *Sustainability*, *13*(15), 8663. https://doi.org/10.3390/su13158663

Virtanen, P., & Jalonen, H. (2023). Public Value Creation Mechanisms in the Context of Public Service Logic: An Integrated Conceptual Framework. *Public Management Review*, *26*(8), 2331–2354. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2268111

Wardi, A., & Aninditiyah, G. (2024). The Impact of Regional Financial Accounting Systems, Public Transparency, and Control Activities on Financial Accountability in Local Governments. *Journal of Management and Informatics*, *3*(1), 20–36. https://doi.org/10.51903/jmi.v3i1.43

Wenjuan, S., & Zhao, K. (2023). Balancing Fiscal Expenditure Competition and Long-Term Innovation Investment: Exploring Trade-Offs and Policy Implications for Local Governments. *Plos One*, *18*(11), e0293158. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293158